INSPEKTORAT

Pernyataan Tujuan	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintah Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian
Indikator Tujuan	**Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP**
PK (Perjanjian Kinerja)	***Inspektur***

Pernyataan Sasaran	Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal		Meningkatknya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Indikator Sasaran	**1. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**	**2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)**	**3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah**
PK (Perjanjian Kinerja)	***Inspektur***		

Program	*6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan*			*6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi*			*1.06.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*			
Sasaran Program	Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pemeriksaan	Meningkatnya kepatuhan auditan terhadap hasil pemeriksaan eksternal	Meningkatnya penanganan aduan berkadar pengawasan	Meningkatnya kualitas dan konsistensi kebijakan teknis pengawasan internal	Meningkatnya praktik akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya budaya antikorupsi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah	
Indikator Program	**Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Wilayah I, II, III** **Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti / Jumlah seluruh rekomendasi *100%**	**Presentase penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan eksternal** **Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (hasil pengawasan eksternal) / Jumlah seluruh rekomendasi (hasil pengawasan eksternal) *100%**	**Persentase penyelesaian tindak lanjut aduan berkadar pengawasan** **Jumlah aduan berkadar pengawasan yang ditangani/ Total jumlah aduan berkadar * 100%**	**Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan Daerah yang Selaras dan/atau Terintegrasi dengan Kebijakan Teknis Pengawasan Nasional** **Jumlah kebijakan teknis pengawasan daerah yang selaras dan/atau terintegrasi dengan kebijakan teknis pengawasan nasional / Total jumlah kebijakan teknis pengawasan nasional * 100%**	**Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Akuntabilitas Meningkat Setelah Pendampingan pada Wilayah I, II, III** **Jumlah PD yang nilai akuntabilitas kinerjanya meningkat/ Jumlah PD yang didampingi * 100%**	**Persentase Perangkat Daerah yang Layak Diusulkan Mendapat Predikat WBK** **Jumlah PD yang layak diusulkan mendapat predikat WBK/ Jumlah PD yang didampingi dalam pembangunan ZI * 100%**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan** **DO: Jumlah dokumen perencanaan (Renja), penganggaran (RKA, DPA) dan laporan capaian kinerja (LKJIP) yang tersusun sesuai ketentuan / Total jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang tersusun * 100%**	**Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan** **DO: Jumlah laporan administrasi keuangan yang tersusun sesuai ketentuan (aspek penyajian dan aspek proses)/ Total jumlah laporan administrasi keuangan yang tersusun * 100%**	**Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan** **DO: ▯** **Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang terdapat dalam RKBMD yang dikelola (pengadaan, pemeliharaan, penatausahaan)/ Total jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola * 100%**	**Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang** **DO: ▯** **Jumlah capaian kinerja kegiatan pada layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi (1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah + 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah + 3.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)/ Total jumlah kegiatan pada layanan penunjang urusan perangkat daerah (1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah + 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah + 3.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) * 100%**
PK (Perjanjian Kinerja)	***Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III***	***Sekretaris***	***Inspektur Pembantu Khusus***	***Sekretaris***	***Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III***	***Inspektur Pembantu Khusus***	***Sekretaris***			

Kegiatan	*6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal*		*6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	*6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*	*6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi*		*1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal Wilayah I, II, III	Meningkatnya kualitas monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal	Meningkatnya kualitas pengawasan khusus	Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan	Meningkatnya peran APIP sebagai consulting partner pada Wilayah I, II, III	Meningkatnya Peran APIP dalam peningkatan Budaya Anti Korupsi Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Meningkatnya kapasitas ASN	Terpenuhinya layanan administasi umum	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Indikator Kegiatan	**Persentase laporan pengawasan internal yang disusun sesuai standar audit** **Jumlah pengawasan internal yang disusun Wilayah I, II, III sesuai standar audit/ Total jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan * 100%**	**Presentase laporan monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan yang disusun sesuai ketentuan** **Jumlah monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan yang disusun sesuai ketentuan/ Total jumlah monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan * 100%**	**Persentase laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun sesuai standar audit** **Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun sesuai standar audit/ Total jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan * 100%**	**Persentase kebijakan teknis pengawasan yang dirumuskan sesuai ketentuan** **Jumlah kebijakan teknis pengawasan yang dirumuskan sesuai ketentuan/ Total kebijakan teknis pengawasan yang dilaksanakan * 100%**	**Persentase perangkat daerah pada Wilayah I, II, III yang mendapatkan pendampingan dan asistensi tata kelola pemerintahan** **Jumlah perangkat daerah pada Wilayah I, II, III yang mendapatkan pendampingan danassistensi tata kelola pemerintahan/ Total jumlah perangkat daerah pada Wilayah I, II, III * 100%**	**Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi peningkatan budaya anti korupsi** **Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi peningkatan budaya anti korupsi/ Total jumlah perangkat daerah * 100%**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang tersusun tepat waktu** **Jumlah dokumen perencanaan (Renja), penganggaran (RKA, DPA) dan laporan capaian kinerja (LKJIP) yang tersusun tepat waktu/ Total jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang harus disusun * 100%**	**Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu**	**Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan**	**Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD**	**Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan**	**Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum**	**Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang**
PK (Perjanjian Kinerja)	***Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III***	***Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi***	***Inspektur Pembantu Khusus***	***Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi***	***Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III***	***Inspektur Pembantu Khusus***		***Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan***						

Sub Kegiatan	*6.01.02.2.01.0001*	*6.01.02.2.01.0002*	*6.01.02.2.01.0003*	*6.01.02.2.01.0004 Reviu*	*6.01.02.2.01.0005*	*6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan*	*6.01.02.2.02.0001*	*6.01.02.2.02.0002*	*6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis*	*6.01.03.2.02.0001*	*6.01.03.2.02.0002 Pendampingan,*	*6.01.03.2.02.0003*	*6.01.03.2.02.0004*
Indikator Sub Kegiatan	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja**	**Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa**	**Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**	**Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun**	**Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**	**Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas**

Sub Kegiatan	*1.06.01.2.01.0001*	*1.06.01.2.01.0007*	*1.06.01.2.02.0001*	*1.06.01.2.02.000*	*1.06.01.2.02.0004*	*1.06.01.2.03.0006*	*1.06.01.2.07.0006*	*1.06.01.2.09.0002*	*1.06.01.2.09.00*	*1.06.01.2.09.00*	*1.06.01.2.05.00*	*3.30.01.2.05.00*	*1.06.01.2.06.00*	*1.06.01.2.06.00*	*1.06.01.2.06.00*	*1.06.01.2.06.00*	*1.06.01.2.06.00*	*1.06.01.2.06.00*	*1.06.01.2.08.00*	*1.06.01.2.08.00*	*1.06.01.2.08.00*	*1.06.01.2.08.00*
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan